

**ANALISIS HUKUM *CRIMES AGAINST HUMANITY* YANG DILAKUKAN
OLEH JEPANG PADA PERANG DUNIA II
(STUDI KASUS UNIT 731)**

Nasta Kurnia Endah Widiaswari¹, Haribertus Jaka Triyana²

INTISARI

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui, menganalisis, dan menelaah kasus Unit 731 yang tidak diadili dalam Tokyo Trial serta untuk menjelaskan bagaimana mekanisme pertanggung jawaban pidana yang dapat diterapkan pada kasus tersebut

Metode dalam penulisan hukum ini adalah penelitian secara normatif dengan menggunakan data sekunder. Penggunaan bahan hukum meliputi bahan hukum primer, sekunder dan tersier melalui teknik pengumpulan berupa studi kepustakaan. Pengolahan data dilakukan dengan metode kualitatif yaitu mengumpulkan data, mengklasifikasi, menguraikan, dan mengevaluasi data dengan menggunakan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku untuk melihat kesesuaian atau sebaliknya, untuk selanjutnya menetapkan kesimpulan guna menjawab permasalahan penelitian.

Hasil penelitian yang telah dilakukan penulis dapat ditarik kesimpulan: 1). hal yang menyebabkan kasus Unit 731 lolos dari peradilan adalah Perang Dingin dan minat Amerika dalam mengamankan data tentang *human experiment* tersebut untuk kepentingan negaranya sendiri. 2). Pertanggung Jawaban yang dapat diterapkan pada kasus Unit 731 adalah secara individual maupun pertanggungjawaban Negara. Dalam *Draft Article on Responsibility of States*, ILC 2001, menentukan tanggung jawab negara dalam bentuk, yaitu: tindakan penghentian (*cessation*) dan tidak mengulangi tindakan (*non repetition*), dan tindakan perbaikan (*reparation*) yang berupa penggantian kerugian (*restitution*), ganti rugi (*compensation*), dan *satisfaction*, atau kombinasi dari seluruhnya.

Kata Kunci: pertanggungjawaban pidana, Unit 731, kejahatan terhadap kemanusiaan, perang dunia ke-II.

¹ Mahasiswa Magister Ilmu Hukum FH UGM, Yogyakarta.

² Dosen Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.

***LEGAL ANALYSIS CRIMES AGAINST HUMANITY DONE BY JAPANESE
ON WORLD WAR II
(CASE STUDY UNIT 731)***

Nasta Kurnia Endah Widyaswari³, Haribertus Jaka Triyana⁴

ABSTRACT

The purpose of this thesis is to analyze and explain why the Unit 731 case was not adjudicated under the Tokyo Trial, along with tracing, analyzing, and explaining the mechanism of criminal responsibility applicable to the said case.

The research method underlying this thesis employs a normative method with the utilization of secondary data. The legal materials included within this thesis encompasses primary, secondary and tertiary legal materials collected through library studies. Data processing under this thesis is conducted by way of a qualitative method in order to collect, classify, describe and evaluate the data by using provisions from applicable laws and its compatibility with the issue in question. Furthermore, the aim is to establish a conclusion suitable to the problems stated within this thesis.

The results of this thesis can essentially be concluded as follows: 1). There are two reasons which obstruct the adjudication of the Unit 731 case: Cold War and America's intention to secure data on human experiment for the benefit of their national interest. 2). Criminal responsibilities that are applicable to the case of Unit 731 are individual and State Responsibility. The Draft Articles on State Responsibility, ILC 2001, determines that state responsibility manifests in the form of: cessation and non-repetition, reparation in the form of restitution, compensation, satisfaction, or a combination the aforementioned examples.

Keywords: criminal responsibility, Unit 731, crimes against humanity, world war II.

³ Mahasiswa Magister Ilmu Hukum FH UGM, Yogyakarta.

⁴ Dosen Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.